

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa kesesengsaran individu memiliki sesuatu identitas yakni tatkala seseorang atau segerombolan orang yang tidak sanggup untuk mencukupi tingkat kesejahteraan terkait ekonominya karena hal tersebut ialah kebutuhan mendasar dari standar kehidupan seseorang. Dalam arti proper, kondisi individu belum tercukupi baik pada komoditi serta finansial guna mensejahterakan keberlangsungan hidupnya dipahami sebagai kemiskinan (Amalia, 2017). Selain itu juga, kemiskinan masih ada kaitannya terhadap lapangan kerja yang terbatas serta seseorang yang dikategorikan sebagai miskin ialah yang tidak memiliki pekerjaan. Adapun, seseorang akan dikategorikan dalam miskin bilamana mereka tidak memperoleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai pada semestinya. Timbulnya persoalan mengenai kemiskinan ialah sebuah persoalan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah serta masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pengentasan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan masyarakat sebabnya hal tersebut adalah salah satu aspek yang penting.

Adanya permasalahan mengenai kemiskinan, sampai kini masih membuat dunia untuk membahas serta mendiskusikan persoalan tersebut, apalagi negara berkembang contohnya yakni Indonesia. Persoalan rumit serta berkeadaan dengan ragam aspek berbeda maka dari itu menyebabkan keutamaan pada prioritas pembangunan ialah masalah kemiskinan (Ferezagia, 2018). Jika dilihat

dari segi upaya, setiap negara telah mengupayakan untuk mengetas kemiskinan pada setiap negaranya melalui program-program yang tentunya telah mereka buat. Kesesuaian dalam memberikan upaya pengentasan kemiskinan memiliki dua strategi yang wajib ditempuh. Upaya yang pertama yakni, pemerintah dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan mereka dari berbagai bidang melalui pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi untuk melindungi keluarga serta kelompok masyarakat. Upaya kedua yakni pemerintah dapat mencegah terjadinya kemiskinan baru dengan memberikan fasilitas pelatihan kepada masyarakat guna memiliki kemampuan untuk melakukan suatu hal. Pemberian fasilitas ini tentunya dapat diragamkan agar masyarakat dapat menyesuaikan dengan kemampuannya lalu dapat diterapkan pada kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, setelah dua upaya yang dipilih tentu ini akan menyebabkan munculnya sebuah kebijakan yang sesuai.

Kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan ini sendiri perlu adanya ketepatan. Adanya skedul mengenai pemberdayaan untuk masyarakat miskin di Indonesia sendiri belum benar-benar mengalami ketepatan serta kesesuaian dalam menangani pengentasan kemiskinan. Persoalan mengenai kehilangan hak kepunyaan serta minimnya dalam perolehan upah, atau secara lebih rinci mengilustrasikan sebuah keadaan individu tidak dapat mencukupi tuntutan pokok insan, yakni akomodasi, konsumsi, serta sandang ialah ilustrasi kemiskinan (Takaredase et al., 2019). Hal tersebut disebabkan kebijakan mengenai pembangunan serta berbagai skedul resolusi ini seringkali kurangnya menilik karakteristik serta konteks lokal masyarakat miskin. Terlihat pada bidang pendidikan yang berkualitas tidak dapat dirasakan oleh jutaan. Lalu pada bidang

kesehatan, mengenai jaminan kesehatan sendiri yang tidak dapat dirasakan kelayakannya secara menyeluruh dan masih banyaknya masyarakat yang kesusahan dalam membiayai kesehatannya. Selain itu, individu dalam memperoleh kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya serta tidak diimbangi dengan kelonjakan pada perkembangan ekonomi juga menyebabkan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Terbatasnya kesempatan kerja ialah salah satu yang menyebabkan peluang untuk memperoleh upah menjadi semakin sempit serta memunculkan individu menjadi miskin. Kemiskinan telah memberikan efek bagi penduduk untuk melakukan apapun dengan tujuan menyelamatkan serta kelayakan hidupnya, serta membuat masyarakat rela menyetujui upah tidak selaras dengan tenaga.

Salah satu yang terpenting dalam menindaklanjuti sebuah permasalahan terkait kemiskinan yakni pentingnya sebuah data kemiskinan agar menjadi bahan utama serta pandangan langkah oleh pemerintah. Pemberian data bukan hanya diberikan dalam kurun waktu satu tahun saja, akan tetapi dari tahun-tahun sebelumnya juga tentunya perlu dicantumkan sebagai bahan untuk membandingkan dari tahun saat ini hingga tahun sebelumnya. Selain data terkait kemiskinan, perlu adanya informasi yang tidak kalah penting yakni mengenai profil kemiskinan. Hal tersebut, menjadi sangat penting lantaran informasi mengenai profil kemiskinan menjadi langkah utama sebelum pengambilan sebuah kebijakan terkait penanganan masalah kemiskinan. Sebab saat pembuatan kebijakan tidak sesuai maka berakibat ketidakefisiensi, ketidakefektif, serta ketidaktepatan sasaran. Oleh sebab itu, data serta profil kemiskinan ialah hal

penting yang wajib dimiliki agar penetapan kebijakan dapat digunakan dan mengurangi kemiskinan.

Table 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Indonesia Bagian Timur tahun 2019-2022 (Persen)

Provinsi	Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)			
	2019	2020	2021	2022
Papua	26.55	26.8	27.38	26.8
Papua Barat	21.51	21.7	21.82	21.43
Nusa Tenggara Timur	20.62	21.21	20.44	20.23
Maluku	17.65	17.99	16.3	16.23
Gorontalo	15.31	15.59	15.41	15.51
Sulawesi Tengah	13.18	13.06	12.18	12.3
Sulawesi Tenggara	11.04	11.69	11.74	11.27
Sulawesi Barat	10.95	11.5	11.85	11.92
Sulawesi Selatan	8.56	8.99	8.53	8.66
Sulawesi Utara	7.51	7.78	7.36	7.34
Maluku Utara	6.91	6.97	6.38	6.37

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berlandaskan pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah pada tahun 2018 hingga tahun 2022, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021 (BPS, 2023). Sementara itu, presentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Indonesia bagian timur menduduki posisi ketiga selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2019 presentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 20.62 persen. Kenaikan terjadi tahun 2020 yakni sebesar 21.21 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 presentase tersebut menunjukkan penurunan yakni sebesar 20.44 persen. Lalu penurunan juga terjadi kembali pada tahun 2022 yakni sebesar 20.23 persen untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.

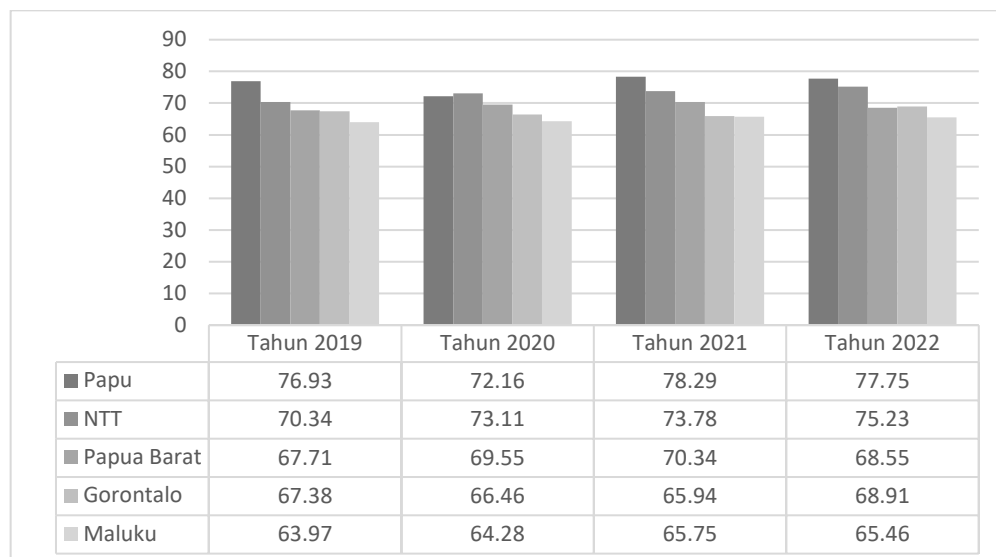
Persoalan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki persamaan terhadap persoalan tengah dihadapi pemerintah pusat, ialah masih tingginya angka kemiskinan. Adapun pengetasan masalah selain pembangunan dan pemerataan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi otoritas pusat yakni memberantas persoalan kemelaratan di Provinsi NTT ialah isu fundamental serta mendapat prioritas untuk ditangani. Otoritas dapat menjalankan strategi kebijakan guna menyokong kesentosaan penduduk miskin (*pro poor*) guna menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Firdaus, 2014). Pembangunan dalam bidang pendidikan serta kesehatan ialah pilar untuk menata individu dalam pembangunan ekonomi ialah semacam sebuah penanaman modal durasi panjang bagi suatu negara. Selain itu, tingginya angka kemiskinan disuatu daerah tidak bisa diputuskan hanya karena satu faktor saja. Perolehan upah penduduk, pengangguran, kebugaran, edukasi, akses terhadap komoditi dan jasa, letak, geografi, gender, serta lingkungan ialah faktor yang saling terkait masalah kompleks yang berpengaruh sehingga menimbulkan kemiskinan (Kevin et al., 2022). Kondisi tersebut tentunya menunjukkan perlunya pembenahan pada kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut yang berdampak pada perubahan serta penurunan pada kemiskinan wilayah tersebut

Pembenahan pada sumber daya manusia yang terus meningkat terutama menyangkut tenaga kerja bagi perekonomian negara tetapi terdapat kenadalah yakni lambannya dalam penyerapan tenaga kerja. Persoalan mengenai tenaga kerja ialah sebuah persoalan yang sangat elusif serta berkembang. Elusif disebabkan karena persoalan ini dapat memberikan efek serta diberikan efek oleh banyak faktor. Serta berkembang karena setiap masanya akan bertambah jumlah manusia serta persoalan

ini menyangkut jutaan jiwa. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara lahirnya angkatan kerja hingga kini terbatas (Karyohadi & Muafiqie, n.d.). Kendala ini menyebabkan pemberian efek pada salah satu faktor yakni pengangguran. Hal tersebut tentu akan menyebabkan tingkat dari pengangguran akan mengalami kenaikan.

Peretasan persoalan tersebut memberikan gambaran terhadap pelamar dimasa mendatang tidaklah mudah. Kondisi ini disebabkan adanya pelamar di kurun waktu sebelumnya serta perlunya didapati pandangan implememntasi di kurun waktu setelahnya. Jika seseorang melaksanakan pekerjaannya secara baik, tentu hasil *outputnya* baik, upah diperoleh individu layak, serta mutu sumber daya manusia ialah persoalan termasuk sering hadir jika membahas terkait tenaga kerja disamping perosalan jaringan industrial antara pekerja beserta sebuah usaha.

Gambar 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2019-2022 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statitik (BPS)

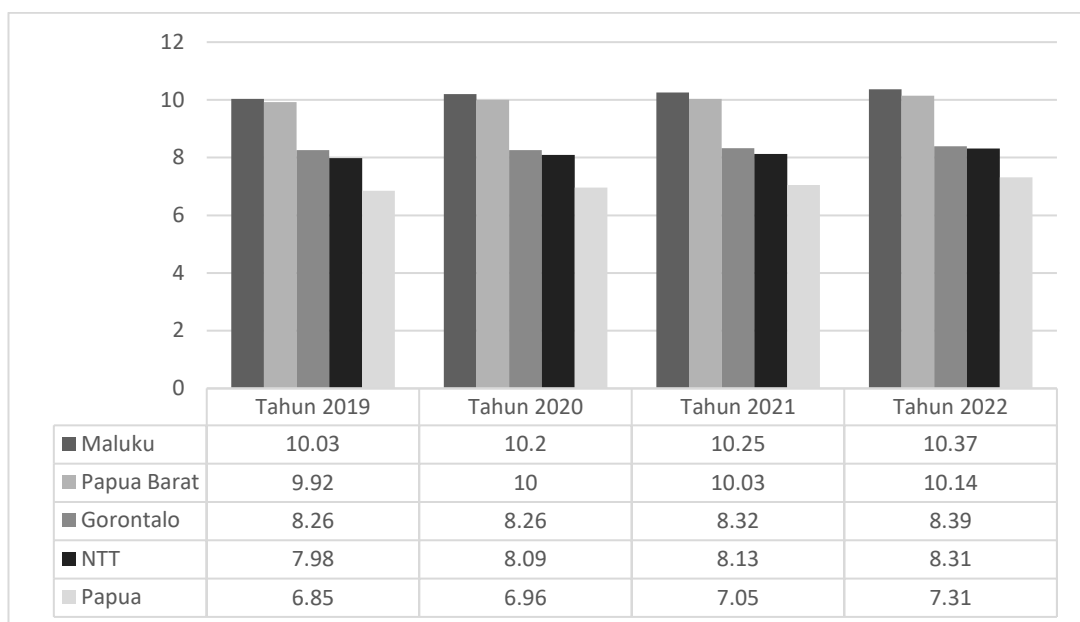
Berlandaskan gambar 1.1 diatas pada lima provinsi untuk Indonesia bagain timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan kedua dari lima. Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun mengalami kenaikan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Bermula dari tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakin sebesar 70.34 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni naik menjadi 73.11 persen, berbeda dengan Papua mengalami penurunan sebesar 72.16 persen. Selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 73.78 persen tahun 2021. Lalu tahun 2022, kenaikan kembali terjadi pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakin sebesar 75.23% persen. Jika melihat data tersebut menunjukkan, pertembuhan angkatan kerja relatif meningkat, tetapi untuk lamaran kerja pada Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terbatas.

Berbincang mengenai fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang dalam berpikir. Pada situasi tersebut menyebabkan seseorang tidak mampu untuk berpikir baik untuk memenuhi kebutuhannya dan bertahan itu. Oleh sebab itu, perlu adanya patokan dalam penggunaan untuk menilik taraf kesentosaan pada penduduk yakni pada parameter edukasi. Pendidikan pada dasarnya ialah usaha sadar individu dalam menambah keilmuan, kecerdasan, juga wawasan. Pendidikan juga mempunyai tujuan untuk proses pemberdayaan peserta didik yang menjadi subjek serta obyek terhadap keberlangsungan kesentosaan hidup jauh membaik. Edukasi juga mempunyai peranan dalam pengintensifan mutu sumber daya manusia yang berdampak pada bidang edukasi baik secara resmi sekalipun non resmi.

Peraturan negara juga telah menjelaskan jika setiap warga berhak atas pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan oleh peraturan negara yakni sebuah edukasi berakar pada mutu-mutu akidah, adat istiadat negara, serta sadar akan adanya perubahan era. Terdapat tujuan pendidikan yakni selarasnya secara komprehensif edukasi yang saling melekat ada pada sistem pendidikan nasional. Adanya stabilitas kesempatan, relevansi edukasi dan pembangunan, mutu edukasi, serta ketepatan guna pengendalian ialah empat inti skema pembangunan pendidikan. Maksud dari pemerataan kesempatan ini ialah adanya penyeluruhan terkait sarana dan prasarana untuk digunakan belajar seperti penambahan jumlah tenaga pengajar serta kelayakan pada gedung untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. Tujuan relevansi pendidikan serta pembangunan yakni menghubungkan terkait sistem pendidikan yang ada terhadap lapangan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan sistem pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang teredukasi, bermutu, serta handal selaras terhadap perkembangan zaman saat ini. Perlu adanya dampak dari pendidikan ini yakni sumber daya manusia menjadi guna serta berhasil guna mencapai tujuan efisiensi pengelolaan dari pendidikan. Tentunya sistem pendidikan dibenahi pemerintah dari tahun ke tahun. Pentingnya meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan warga, dan membangun harkat negara dan bangsa, maka dari itu pemerintah berusaha dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi ialah upaya pemberantasan kebodohan memerangi kemiskinan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Pristiwanti et al., 2022).

Selain pendidikan, terdapat juga upah yang menjadi dampak ketika seseorang telah berhasil dalam memperjuangkan pendidikan serta penyesuaian terhadap kriteria perusahaan saat ini. Hal tersebut disebabkan perusahaan-perusahaan saat ini memiliki syarat yang tinggi untuk menjadi karyawan pada perusahaan. Pendidikan juga menyebabkan kita terhindar dari kemiskinan disebabkan kita pada akhirnya terhindar dari pengangguran. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan dua kemungkinan yakni diterimanya seseorang pada semua perusahaan serta seseorang mampu untuk membuka usaha sendiri. Kedua hal tersebut menunjukkan seseorang akan memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.

Gambar 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2019-2022 (Persen)



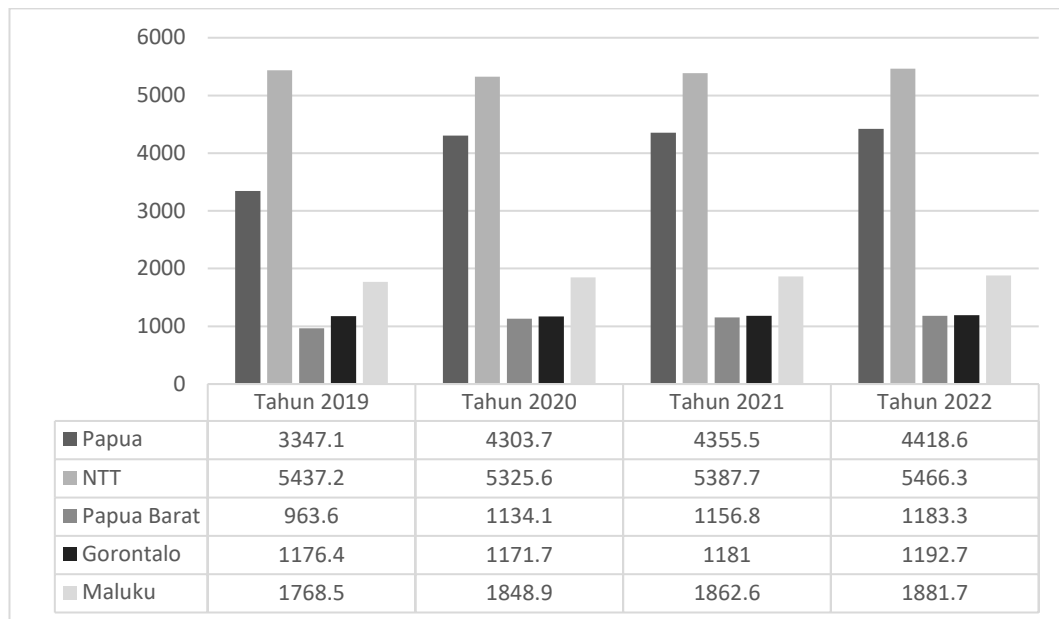
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas menunjukkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri berada pada urutan keempat dari lima provinsi yang berada pada Indonesia bagian timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kenaikan setiap tahun. Adanya rata-rata lama sekolah sendiri menjadi bukti bahwa rata-rata tahun dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berusia 15 tahun telah menempuh masa pendidikan. Pada tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata lama sekolah menduduki 7.98 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yakin sebesar 8.09 persen. Pada tahun 2021 walaupun terdapat perubahan untuk media pembelajaran di Indonesia secara daring Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kenaikan yakni pada 8.13 persen. Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 kenaikan tersebut masih terjadi yakin sebesar 8.31. Akan tetapi kenaikan yang terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masih menunjukkan bahwa rata-rata tahun dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk usia 15 tahun masih terpaut dengan Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Gorontalo.

Kemiskinan juga bisa terjadi disebabkan adanya perbedaan mengenai tingkat pendapatan, geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Permasalahan mendasar pada suatu daerah mengenai pembangunan ekonomi yakni jumlah penduduk. Fenomena tersebut disebabkan apabila pembangunan ekonomi tidak tercapai disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Hal ini disebabkan, apabila pembangunan ekonomi dapat tercapai maka kesejahteraan juga akan dirasakan oleh masyarakat serta angka kemiskinan ditekan. Sehingga, adanya pendorong serta penghambat dari pembangunan bertolak pada perkembangan jumlah penduduk pada suatu daerah.

Jumlah penduduk menjadi faktor pendorong disebabkan banyaknya tingkat tenaga kerja, luas pasar dan barang yang dilandaskan pada dua hal yakni pendapatan serta masyarakat atau jumlah penduduk.

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2019-2022 (Ribuan Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas menunjukkan jumlah penduduk terhadap lima provinsis untuk wilayah Indonesia bagian timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dari kelima provinsisi. Untuk jumlah penduduk pada Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kefluktuatifan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 5437.2 ribu jiwa. Selanjutnya tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 111.6 ribu jiwa dari tahun sebelumnya menjadi 5325.6 ribu jiwa. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan yakni sebesar 5387.7 ribu jiwa dan masih menjadi peringkat pertama dari lima provinsi untuk Indonesia bagian timur. Lalu tahun 2022 kenaikan kembali terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni menjadi 5466.3 dari

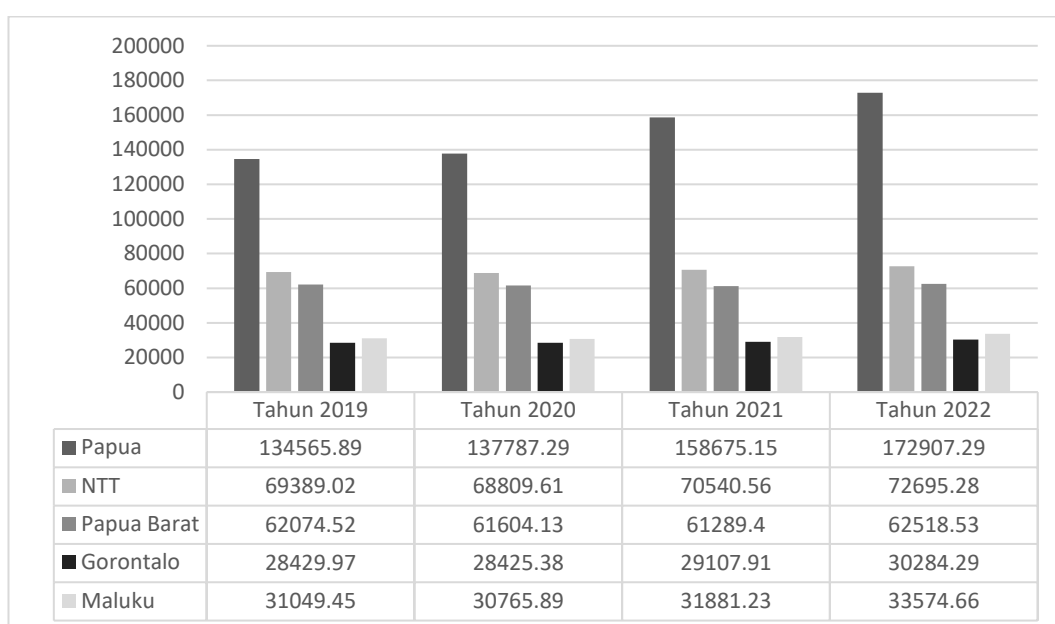
tahun sebelumnya serta tetap menjadi provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi untuk wilayah Indonesia bagian timur. Jumlah penduduk yang tinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berdampak pada pengangguran yang tinggi serta rendahnya produktivitas. Oleh sebab itu, jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap presentase penduduk miskin.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan pada suatu daerah tidak dapat berpacu pada satu faktor saja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi salah satu faktor kemiskinan pada suatu daerah terjadi. Hal ini disebabkan ketika kenaikan terjadi pada PDRB tanpa melihat kenaikannya besar atau kecil sehingga suatu wilayah mengetahui terkait laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilandaskan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetapi perlu melihat mengenai penyebaran ke penduduk mengenai sosok yang telah ikut serta menikmati hasil-hasilnya mengenai distribusi pendapatan yang diperoleh.

Apabila pada suatu daerah mengalami penurunan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tentu akan berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Rumah tangga akan dengan terpaksa merubah konsumsi baik secara makanan maupun kebutuhan lainnya ke produk yang lebih murah dengan jumlah barang yang berkurang. Kondisi tersebut terjadi apabila persebaran pendapatan penduduk menjadi terbatas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah salah satu indikator suatu wilayah mengenai pertumbuhan ekonomil. Nilai berish barang dan jasa-jas akhir yang diperoleh melalui kegiatan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu merupakan makna dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika suatu wilayah mempunyai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

tinggi tidak menjadi jaminan seluruh penduduknya telah menikmati hasilnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah ilustrasi umum mengenai kesejahteraan masyarakat. Kenaikan pada suatu wilayah terkait Produk Domestik Regional Bruto PDRB menyatakan jika pemerintah mampu mengatasi permasalahan kemiskinan.

Gambar 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2019-2022 (miliar rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.4 diatas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada lima provinsi bagian timur Indonesia. Papua menduduki peringkat pertama dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua yakni 134565.89 miliar rupiah tahun 2019 dan 172907.29 miliar rupiah tahun 2022 dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Untuk provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah dari lima provinsi bagian timur Indonesia yakni Maluku.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku yakni sebesar 31049.45 miliar rupiah tahun 2019 dan 33574.66 miliar rupiah tahun 2020.

Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri berada pada posisi kedua dari lima provinsi bagian timur Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni sebesar 69389.03 miliar rupiah. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni menjadi 68809.61 miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2021 hingga 2022 kenaikan terjadi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk tahun 2021 70540.56 miliar rupiah dan tahun 2022 72695.28 miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berlandaskan uraian latar belakang yang telah dibuat, tentu perlu adanya penelusuran terkait Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi peringkat ketiga dari 10 Provinsi bagian timur Indonesia terkait presentase penduduk miskin dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Sumber Daya Manusia (SDM), upah, pendapatan, geogradis. Maka dari itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian serta mengambil judul “Faktor-Faktor yang Menentukan Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.”

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan peristiwa yang telah diuraikan di atas maka rumusan Masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah rata-rata lama sekolah mempunyai pengaruh terhadap presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022?
2. Apakah tingkat partisipasi angkatan Kerja (TPAK) mempunyai pengaruh terhadap presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022?
3. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh terhadap presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjabaran mengenai rumusan persoalan tersebut, Akibatnya terdapat tujuan dari pengkajian ini yakni :

1. Untuk menelaah seberapa impak pada rata-rata lama sekolah terhadap presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022
2. Untuk menelaah seberapa impak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022
3. Untuk menelaah seberapa impak pada jumlah penduduk terhadap presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022
4. Untuk menelaah seberapa impak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022.

1.4 Ruang Lingkup

Jangkauan pada pengkajian ini ialah memerlukan metode kuantitatif dengan data panel pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tahun 2019 – 2022. Jangkauan pada pengkajian ini guna untuk penelaahan aspek-aspek memberikan berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan variabel rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independen. Variabel dependen menggunakan presentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Berlandaskan penjabaran tentu memunculkan adanya manfaat yang didapatkan pada pengkajian ini ialah berikut :

1. Bagi pengamat, pengamat melaksanakan pengkajian ini guna menjadi salah satu ketentuan tugas akhir untuk menuntaskan studi S1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan serta sebagai bentuk implementasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sehingga, diharapkan mampu menambah wawasan terkait penelitian yang dilakukan.
2. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan informasi untuk pengembangan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan serupa.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan gagasan informasi untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan

serta potensi sekitar demi pengetasan adanya kesetaraan gender. Serta sebagai sarana peningkatan kepedulian dan kesejahteraan daerahnya.

4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna untuk seluruh pihak dan dapat dijadikan bahan acuan yang berhubungan dengan penelitian terhadap sektor ekonomi maupun sejenisnya.